

## ABSTRAK

Johakim Reda Langoday, 22.75.7328. *Relevansi Madilog dalam Menyoroti Kembalinya Peran Ganda Militer di Indonesia: Studi Atas Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI*. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep *Madilog* (materialisme, dialektika, dan logika) yang diperkenalkan oleh Tan Malaka sebagai dasar pemikiran bagi para pemangku kepentingan dalam proses legislasi. Kerangka tersebut dimanfaatkan untuk mengkaji polemik terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang memicu kritik serta penolakan dari berbagai kalangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Keterlibatan militer dalam ranah sipil dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan demokrasi, terutama karena dapat mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer serta melemahkan prinsip supremasi sipil. Dalam konteks revisi tersebut, ditemukan permasalahan dalam proses legislasi yang kurang transparan dan tidak partisipatif, disertai substansi perubahan yang membuka peluang perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi undang-undang ini mengandung persoalan mendasar, baik dari segi prosedural maupun substansial, yang berpotensi melemahkan supremasi sipil. Dalam perspektif *Madilog*, proses pembentukan regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang objektif, dialektis, dan logis. DPR dan pemerintah dinilai belum secara optimal mempertimbangkan realitas sosial serta aspirasi publik. Selain itu, perluasan peran TNI di luar bidang pertahanan yang berpotensi menghidupkan kembali peran ganda militer dinilai tidak rasional di tengah tuntutan peningkatan profesionalisme TNI. Dengan demikian, *Madilog* tetap relevan sebagai instrumen analisis kritis dalam menilai pembentukan peraturan perundang-undangan agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

**Kata kunci:** *Madilog*, peran ganda militer, TNI, relasi sipil-militer, demokrasi.

## ABSTRACT

Johakim Reda Langoday, 22.75.7328. *The Relevance of Madilog in Highlighting the Return of the Dual Role of the Military in Indonesia: A Study of the Formation of Law No. 3 of 2025 Concerning Amendments to Law No. 34 of 2004 Concerning the TNI*. Thesis. Undergraduate Programme, Philosophy Study Programme, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2026.

This study aims to analyze the relevance of the *Madilog* concept (materialism, dialectics, and logic) introduced by Tan Malaka as a basis for thinking for stakeholders in the legislative process. This framework is used to examine the polemics related to the revision of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces into Law Number 3 of 2025, which has sparked criticism and rejection from various groups. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Military involvement in the civilian sphere is considered to have the potential to have a negative impact on democratic life, primarily because it can blur the boundaries between civilian and military authority and weaken the principle of civilian supremacy. In the context of the revision, problems were found in the legislative process that was less transparent and participatory, accompanied by the substance of the changes that opened up opportunities to expand the role of the TNI beyond defense functions.

The results of the study indicate that the revision of this law contains fundamental problems, both procedurally and substantively, which have the potential to weaken civilian supremacy. From a *Madilog* perspective, the process of formulating the regulation does not fully reflect an objective, dialectical, and logical approach. The DPR and the government are considered to have not optimally considered social realities and public aspirations. Furthermore, expanding the TNI's role beyond defense, which could potentially revive the military's dual role, is considered irrational amidst demands for increased professionalism. Therefore, *Madilog* remains relevant as a critical analytical tool for assessing the formation of legislation to ensure it remains oriented toward the public interest.

**Keywords:** *Madilog*, dual role of the military, TNI, civil-military relations, democracy.